

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM
MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA TIGA
DESA DI KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU
RANAU TENGAH KABUPATEN
OKU SELATAN
(Studi Kasus pada Desa Subik, Desa Jepara, dan Desa Sukarami)**

SKRIPSI



Nama : Ermita Gustina

NIM : 22 2014 284

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM
MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA TIGA
DESA DI KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU
RANAU TENGAH KABUPATEN
OKU SELATAN
(Studi Kasus pada Desa Subik, Desa Jepara, dan Desa Sukarami)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Ermita Gustina

NIM : 22 2014 284

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ermita Gustina
Tempat Tanggal Lahir : Sukamarga, 16 Agustus 1996
NIM : 22 2014 284
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah dibuat dengan sungguh- sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya- karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019



ERMITA GUSTINA

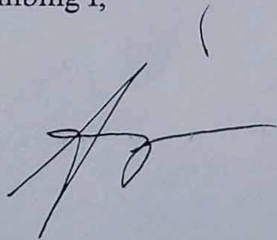
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam
Meningkatkan *Good Governance* Pada Desa di
Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Kabupaten OKU Selatan
Nama : Ermita Gustina
Nim : 22 2014 284
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,

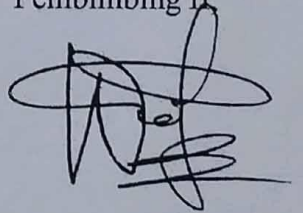
Pembimbing I,



Hj. Rosalina Ghozali, S.E., M.Si., Ak.

NIDN/NBM : 0228115802/1021961

Pembimbing II



Welly, S.E., M.Si

NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan

u b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., Ak., M.Si., CA

NIDN/NBM : 0216106902/944806

ABSTRAK

Ermita Gustina/222014284/2019/Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan *Good Governance* Pada Tiga Desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan/Akuntansi Sektor Publik.

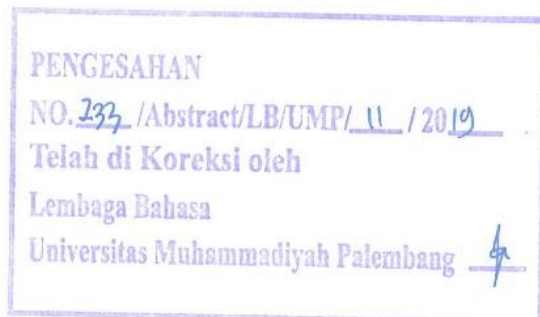
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan desa pada tiga desa dikecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan dalam meningkatkan *Good Governance*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada tiga desa dikecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan dalam meningkatkan *Good Governance*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bersifat menjelaskan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan *Good Governance*. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa dan *Good Governance*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan kuesioner serta dokumentasi. Analisis data dan teknik analisis adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan *Good Governance* pada tiga desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan sesuai dengan indikator belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa dan *Good Governance*

Ermita Gustina/222014284/2019/An Analysis of Village Financial Management in Improving Good Governance in the Village of Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan/ Public Sector Accounting.

The formulation of the problem in this research was to know the village financial management in three villages of Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan in improving Good Governance. The purpose of this study was to determine the village financial management in three villages of Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan in improving Good Governance. This research was a type of descriptive research, which was an explanatory study to determine village financial management in improving good governance. Operational variables in this study were village financial management and good governance. The data used primary and secondary data. Data collection techniques in this study used interview techniques, questionnaires and documentation. Data analysis and analysis techniques were qualitative analysis. The results of this study indicated that village financial management in improving Good Governance in three villages in the Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan in accordance with the indicators had not grun well.

Keywords: Village Fund Management and Good Governance.



PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya.

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan *Good Governance* pada Tiga Desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah” penulis bersyukur dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepada kedua orangtuaku Ayahku (Irzon) dan ibuku (Marlina) juga saudaraku (Pra Yongki Falentin & Erlia Monica) yang tak pernah henti selalu memberikan doa, menguatkan dan memberi semangat baik moril dan materil. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ibu Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si dan ibu Welly, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan bimbingan dan memberikan saran serta masukan yang tulus dan ikhlas guna

menyelesaikan skripsi ini, selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, S.E., M.M. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua program dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Mella Handayani, S.E., Ak sebagai pembimbing Akademik
5. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf di kantor camat Buay Pematang Ribu Ranau tengah dan perangkat desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
8. Teman-teman paket 17 dan teman-teman seperjuangan lainnya.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Akhirul Kalami, HadanallahuWaiyyakum Ajma'ain

Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wa Barokaatuh

Palembang, Februari 2019

(Ermita Gustina)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO | v |
| HALAMAN PRAKATA | vi |
| HALAMAN DAFTAR ISI | ix |
| HALAMAN DAFTAR TABEL | xi |
| HALAMAN DAFTAR GAMBAR | xiv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Landasan Teori | 16 |
| 1. Keuangan Desa | 16 |
| 2. Pengelolaan Keuangan Desa | 17 |
| 3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa..... | 29 |

| | |
|---|----|
| 4. Dana Desa..... | 30 |
| 5. <i>Good Governance</i> | 31 |
| a. Definisi <i>Good Governance</i> | 31 |
| b. Prinsip <i>Good Governance</i> | 32 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian | 44 |
| C. Operasionalisasi Variabel..... | 44 |
| D. Data yang Diperlukan..... | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| F. Analisis Data dan Teknik Analisis | 47 |
| G. Jadwal Penelitian..... | 48 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian..... | 48 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 57 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan..... | 87 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang di atur dalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan alat mengoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk suatu periode tertentu (Yuliansyah & Rusmianto, 2016: 50). Sedangkan menurut V. Wiratna (2015: 33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat

memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.

Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan Pemandagri Nomor 113 tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sehingga dengan hak otonom tersebut desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009: 33). Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (V. Wiratna, 2015: 18).

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Atas dasar APBDes dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (V. Wiratna, 2015: 19)

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (V. Wiratna, 2015: 21).

Laporan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hoesada, 2016: 1). Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *blameworthiness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab (Indra, 2010: 385).

Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan prinsip-prinsip *good governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20).

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (V. Wiratna, 2015: 28). Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung (V. Wiratna, 2015: 29)

Melihat dari prinsip *good governance* ini adanya dana desa yang dialokasikan ke desa cukup besar agar dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga prinsip *good governance* tersebut sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (V. Wiratna, 2015: 27).

Beberapa informasi dan berita yang ada diperoleh informasi bahwa: Ratusan masyarakat desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pedada Kab. Pesawaran berkumpul dilapangan Kantor Bupati Pesawaran menyampaikan tuntutan kepada bupati Pesawaran Dendi Rhamadona untuk segera memberhentikan Rukun Purwadi dari jabatannya selaku kepala desa Batu Raja. Dalam orasinya masyarakat menyampaikan, dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Desa batu raja, Rukun Purwadi tidak pernah transparan dalam

penggunaan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD/APBN. Saiful Efendi mengatakan, masyarakat sudah gerah dengan kelakuan Kades Baturaja, Perealisasi dana desa yang diketahui oleh masyarakat Desa Batu Raja ini, anggaran yang direalisasikan sangat tidak sesuai dengan rencana anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, ditambah lagi dugaan pungli pembuatan KTP sebesar 150 ribu/KTP, juga masyarakat selama 4 bulan terakhir tidak mendapatkan raskin. www.lidikkrimsusnews.com

Fraksi Partai Amanat Nasional DPRK Aceh Barat, Provinsi Aceh menilai pengelolaan dana desa di daerah itu belum transparan sehingga berpotensi memunculkan konflik di tingkat masyarakat pedesaan. Ketua F-PAN DPRK Aceh Barat, Said Mahdani di Meulaboh, Rabu mengatakan, pihaknya telah banyak mendapat pengaduan dari masyarakat sehingga harus disikapi dengan bijak oleh pihak terkait agar tidak berbuntut persoalan lain. <https://aceh.antaraneews.com/berita/37269/dana-desa-aceh-barat-dinilai-tidak-transparan>

Berita lainnya adalah mekanisme 3 Tahap Penyaluran Dana Desa (DD) tidak efektif dalam mempercepat pembangunan desa. Mekanisme tersebut kini menjadi sorotan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) untuk dilakukan perubahan. "Usulan kami, khususnya untuk revisi PP (Peraturan Pemerintah), kalau 3 tahap sekarang, ibaratnya enggak efisien, terlalu banyak prosedural yang harus kita lakukan. Dengan 2 tahap akan lebih efisien, dalam perencanaan akan lebih mudah," ungkap Sekretaris Kemendes Anwar Sanusi di Martapura, Kalimantan Selatan

pada Jumat (27/11/2015) malam.

<http://www.keuandangesa.info/2015/11/penyaluran-dana-desa-tidak-efisien.html>

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina dan Elisabeth, (2016) yang berjudul Analisis pengelolaan keuangan dana Gerbangku di kampung Onggari Distrik Malind. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa di kampung Onggari sudah cukup transparan dan akuntabel dengan partisipasi warga yang cukup proaktif dalam pelaksanaan semua bidang pembangunan. Namun, besarnya alokasi dana pada masing-masing bidang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang cukup signifikan terjadi pada alokasi dana untuk belanja pembangunan yang ditentukan sebesar 50% dan dianggarkan sebesar 84%. Kendala utama yang dihadapi oleh kampung Onggari adalah masih kurangnya pengetahuan dan kompetensi SDM dibidang keuangan, sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan oleh petugas pendamping dari pemerintahan daerah Merauke.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suci, (2015) berjudul Akuntabilitas Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitian ini adalah manajemen keuangan desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan

adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendra, (2014) berjudul Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni: perencanaan ADD di desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di desa Sukowilangun telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama. Dalam pertanggungjawaban dilihat secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan pemekaran Kabupaten

Ogan Komering Ulu (OKU) yang diresmikan dengan UU No. 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada 16 Januari 2004 di Muara Dua, ibukota kabupaten OKU Selatan. Kabupaten OKU Selatan ini memiliki 18 Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah diapit oleh dua kecamatan yaitu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan Kecamatan Banding Agung. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah memiliki 22 desa dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah ini Terletak di Desa Simpang Sender. Dari 22 Desa tersebut ada tiga desa yang akan dijadikan sampel penelitian yaitu Desa Subik, Desa Jepara dan Desa Sukarami. Berikut adalah profil singkat dari tiga desa tersebut:

Tabel I.1
Data Jumlah Penduduk

| No | Nama Desa | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah KK |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Desa Subik | 144 jiwa | 160 jiwa | 79 KK |
| 2 | Desa Jepara | 255 jiwa | 264 jiwa | 147 KK |
| 3 | Desa Sukarami | 412 jiwa | 360 jiwa | 182 KK |

Desa Subik, Jepara, Sukarami, 2018

Dari tabel I.1 dapat dilihat jumlah penduduk dari ketiga desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah yaitu desa Subik, desa Jepara, dan desa Sukarami. Di desa Subik, desa Jepara, dan desa Sukarami mayoritas pekerjaan Penduduknya adalah sebagai petani kopi. Berikut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

Tabel 1.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017
Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

| No | Nama Desa | APBDEs 2017 |
|----|------------------------|-----------------|
| 1 | Gedung Baru | Rp. 796.860.000 |
| 2 | Hangkusa | Rp. 780.334.000 |
| 3 | Jepara | Rp. 831.885.036 |
| 4 | Padang Ratu | Rp. 822.892.000 |
| 5 | Pakhda Suka | Rp. 813.200.000 |
| 6 | Serumpun Jaya | Rp. 806.077.000 |
| 7 | Simpang Sender | Rp. 832.168.000 |
| 8 | Simpang Sender Selatan | Rp. 835.241.552 |
| 9 | Simpang Sender Tengah | Rp. 824.275.000 |
| 10 | Simpang Sender Timur | Rp. 819.454.000 |
| 11 | Simpang Sender Utara | Rp. 798.610.000 |
| 12 | Subik | Rp. 854.351.062 |
| 13 | Sukabumi | Rp. 825.207.962 |
| 14 | Sukamarga | Rp. 869.682.772 |
| 15 | Sukarami | Rp. 825.524.942 |
| 16 | Sumber Jaya | Rp. 821.493.000 |
| 17 | Sumber Mulia | Rp. 807.275.000 |
| 18 | Tanjung Baru Ranau | Rp. 814.987.893 |
| 19 | Tanjung Kemala | Rp. 827.068.000 |
| 20 | Tanjung Sari | Rp. 843.796.000 |
| 21 | Tanjung Setia | Rp. 837.233.169 |
| 22 | Wayrelai | Rp. 829.610.000 |

Sumber: Kantor Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, 2018

Berikut daftar tabel program pemerintahan dari ketiga desa yang akan diteliti tersebut, dengan kriteria sebagai berikut:

T : Terlaksana

T.T : Tidak Terlaksana

S.B : Sedang Berlangsung

Tabel I.3
Program Pemerintah Desa Subik
Yang menggunakan Anggaran Dana Desa

| Tahun | Bidang dan Jenis kegiatan | | Ket |
|---|-----------------------------------|---|-----|
| | Bidang Program | Jenis Kegiatan | |
| 2017 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1. Pembayaran penghasilan tetap & tunjangan | T |
| | | 2. Alat Tulis Kantor | T |
| | | 3. Perangko, materai, & benda pos lainnya | T |
| | | 4. Perjalanan Dinas Kades & Perangkat | T |
| | | 5. Biaya penyelesaian dan penggandaan pelaporan | T |
| | | 6. Operasional BPD | T |
| | Pembangunan Desa | 1. Pembangunan Drainase/ siring pasang | T |
| | | 2. Operasional guru PAUD | T |
| | | 3. Mesin steam | T |
| | | 4. selang | T |
| | | 5. seng | T |
| | | 6. pembangunan jambanisasi | S.B |
| | | 7. pengadaan sarung kursi 163 buah | T.T |
| | Pembinaan Masyarakat | - | - |
| | Pemberdayaan Masyarakat | 1. Penyertaan modal usaha/ penambahan modal BUMDes | T |
| | | 2. Kegiatan PKK & Posyandu | T |
| | | 3. Kegiatan karang taruna | T.T |
| | | 4. Kegiatan LPM | T |
| | | 5. Kegiatan BPD | T |
| | | 6. Kegiatan perangkat desa | |
| | | 7. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM lembaga kemasyarakatan | T |
| 8. Pelatihan PTPKD dan kader teknis | | T | |
| 9. Pelatihan pengelolaan BUMDes | | T | |
| 10. Musyawarah desa pembentukan pendirian BUMDes, penyusunan PerDes | | T | |
| 11. Musyawarah penyusunan/ penetapan RPJMDesa, RKPDesa, & APBDes | | T | |
| 12. Pembuatan dan pemasangan banner dana desa | | T.T | |
| 13. Pembuatan dan pemeliharaan papan informasi desa | | T.T | |
| 14. Perencanaan dan penyusunan RAB | | T | |

Sumber: Desa Subik, 2018

Tabel I.4
Program Pemerintah Desa Jepara
Yang menggunakan Anggaran Dana Desa

| Tahun | Bidang dan Jenis kegiatan | | Ket |
|-------|-----------------------------------|---|-----|
| | Bidang Program | Jenis Kegiatan | |
| 2017 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1. Pembayaran penghasilan tetap & tunjangan | T |
| | | 2. Alat Tulis Kantor | T |
| | | 3. Perangko, materai, & benda pos lainnya | T |
| | | 4. Perjalanan Dinas Kades & Perangkat | T |
| | | 5. Biaya penyelesaian dan penggandaan pelaporan | T |
| | | 6. Biaya dokumentasi | T |
| | | 7. Operasional BPD | T |
| | | 8. Pemeliharaan kursi dan jasa pengelolaan | T |
| | | 9. Biaya gotong royong kebersihan | T |
| | Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1. Jalan rabat beton | S.B |
| | | 2. Pemasangan siring pasang/ drainase | S.B |
| | | 3. Penambahan makanan gizi lansia dan balita | T |
| | | 4. Pengadaan rempel panggung | T.T |
| | | 5. Pengadaan vicensa wadah air 4 buah, werles 2 buah, vicensa kue basah 10 buah | T |
| | Pembinaan Masyarakat | - | - |
| | Pemberdayaan Masyarakat | 1. Penyertaan modal usaha BUMDes | T |
| | | 2. Kegiatan PKK | T |
| | | 3. Kegiatan posyandu | T |
| | | 4. Kegiatan karang taruna | T |
| | | 5. Kegiatan LPM & BPD | T |
| | | 6. Kegiatan perangkat desa | T |
| | | 7. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan | T |
| | | 8. Pelatihan PTPKD dan kader teknis | T |
| | | 9. Pelatihan pengelolaan BUMdes | T |
| | | 10. Musyawarah perumusan/ penetapan RPJMDesa, RKPDesa, APBDes | T |
| | | 11. Pembuatan banner dana desa | T.T |
| | | 12. Pembuatan dan pemeliharaan papan informasi desa | T.T |
| | | 13. Perencanaan dan penyusunan design dan RAB | T |

Sumber: Desa Jepara, 2018

Tabel I.5
Program Pemerintah Desa Sukarami
Yang menggunakan Anggaran Dana Desa

| Tahun | Bidang dan Jenis kegiatan | | Ket |
|----------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | Bidang Program | Jenis Kegiatan | |
| 2017 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan | T |
| | | 2. Alat Tulis Kantor | T |
| | | 3. Perangko, materai, & benda pos lainnya | T |
| | | 4. Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat | T |
| | | 5. Biaya penyelesaian dan penggandaan pelaporan | T |
| | | 6. Biaya dokumentasi | T |
| | | 7. Pemeliharaan kursi dan jasa pengelola | T |
| | | 8. Biaya gotong rotong kebersihan | T |
| | Pembangunan Desa | 1. Pembangunan Gedung PAUD | S.B |
| | | 2. Pembangunan Jalan Rabat Beton | S.B |
| | | 3. Pembangunan Plat Deker | T.T |
| | | 4. Belanja Pegawai Honorarium | T |
| | | 5. Pengadaan mesin giling bumbu | T |
| | | 6. Pengadaan mesin parut kelapa | T |
| | | 7. Pengadaan sound system | T |
| | | 8. Pengadaan air masak sterilis | T |
| | | 9. Pengadaan seng 4 kodi | S.B |
| | | 10. Pakaian adat 1 set | T |
| | Pembinaan Masyarakat | - | - |
| | Pemberdayaan Masyarakat | 1. Penyertaan modal usaha /penambahan modal BUMDes | T |
| 2. Kegiatan PKK | | T | |
| 3. Kegiatan Posyandu | | T | |

Sumber: Desa Sukarami, 2018

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat dilihat jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari 22 desa di kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, peneliti hanya mengambil 3 desa dari keseluruhan desa tersebut yaitu desa Subik, desa Jepara, dan desa Sukarami karena ketiga desa ini mempunyai anggaran dana yang cukup besar dengan kondisi desa yang lebih kecil dibanding desa yang lainnya.

Fenomena yang ada pada Desa Subik, Desa Jepara dan Desa Sukarami dapat dilihat pada tabel I.3, tabel I.4, dan tabel I.5 bahwa masih ada program kerja desa yang masih belum terealisasi. Pengelolaan keuangan di tiga desa di kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah seperti di dalam Perencanaan pembangunan program-program untuk desa masyarakat tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan atau musyawarah rencana pembangunan desa relative masih rendah dan hanya satu atau dua orang selain perangkat desa yang dijadikan formalitas untuk memenuhi daftar hadir musyawarah desa. Dan pada tahap pertanggungjawaban laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak diinformasikan kepada semua masyarakat desa secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan tidak tersedia papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya sebagai media penyampai informasi kepada masyarakat. Tentu saja itu tidak sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan survei pendahuluan fenomena lainnya yang terjadi yaitu Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan dana desa, pengambilan keputusan, serta kritik dan saran belum baik keterlibatannya. Dalam pengelolaan dana desa perangkat desa terkadang belum terbuka mengenai dana yang digunakan. Pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat desa masih belum baik.

Berdasarkan survei pendahuluan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum ketiga desa tersebut yang ada di kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan memiliki permasalahan yang sama dalam melakukan pengelolaan dana desa belum efektif dalam menerapkan prinsip *good governance* dan didalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa dalam tata kelola desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan *Good Governance* pada Tiga Desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan (Studi Kasus pada Desa Subik, Desa Jebara, dan Desa Sukarami)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengelolaan Keuangan Desa dalam meningkatkan *Good Governance* pada tiga desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan Keuangan Desa dalam meningkatkan *Good Governance* pada tiga desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan tentang topik yang diteliti, serta menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan Keuangan Desa dalam meningkatkan *Good Governance*.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan agar dapat menggunakan keuangan desa lebih baik lagi dan dapat meningkatkan *Good Governance*.

3. Bagi Almamater

Diharapkan menambah sebuah referensi baru dari ilmu analisis pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi. 2015. Penyaluran Dana Desa Tidak Efisien. <http://www.keuangandes.info/2015/11/penyaluran-dana-desa-tidak-efisien.htm> 16 November 2018
- Azuar Juliandi, Irfan, & Sapriyal Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS
- Danang Sunyoto. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama
- Dina Fitri Septarini dan Elisabeth Lia Riani kore. 2016. analisis Pengelolaan Keuangan Desa Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. VII, No. 1, April 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/163103-ID-analisis-pengelolaan-keuangan-dana-gerba.pdf>
- Hendra Kurniawan. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa*. ISSN: 2337-56xx 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/190166-ID-akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-d.pdf>
- Indra Bastian. 2015. *Akuntansi Sektor Public*. Jakarta: Erlangga
- Inten Meutia dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* Vol 8. ISSN: 2089-5879, <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/645/pdf&ved>
- Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 10 ISSN: 1979-858X, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/download/5936/pdf&ved>
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Said Mahdani. 2017. Dana Desa Aceh Barat dinilai Tidak Transparan. <https://aceh.antarane.ws.com/berita/37269/dana-desa-aceh-barat-dinilai-tidak-transparan> 16 November 2018
- Saiful Efendi. 2017. Alokasi Dana Desa Tak Transparan, Kades Baturaja Dituntut Turun Jabatan. www.lidikkrimsusnews.com 16 November 2018

- Suci Indah Hanifah. 2015. Akuntabilitas dan transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* Vol. 4 No. 8 2015, <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/997/948>
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat